



Dewas IPOSS Dubes Yuri O. Thamrin, MA menyampaikan keynote speech dalam bedah buku dan diskusi di UGM, Yogyakarta

Keberlanjutan Sawit Bikin Dunia Baper?

Status Indonesia sebagai produsen terbesar kelapa sawit, komoditas minyak nabati paling produktif di dunia berhasil membuat “iri” bangsa di dunia. Apalagi komoditas ini mampu menghidupi kisaran 18 juta penduduk Indonesia dari rantai hulu hingga hilir, suatu jumlah yang melebihi penduduk Belanda. Sadar akan ancaman terhadap sawit semakin besar, Pemerintah menyerukan agar berbagai pihak terkait lebih serius pasang “kuda-kuda”. Duta Besar Yuri O. Thamrin secara tegas mengatakan kepada dunia, *“if you disturb our palm oil, it is going to be serious, it will affect relations between Indonesia and his partner.”*

Bersama para pakar ekonomi, lingkungan dan pertanian, kelapa sawit menjadi bahan diskusi hangat diantara 350 mahasiswa yang hadir di auditorium MM UGM (27/09/24). Kegiatan yang dihelat oleh IPOSS tersebut merupakan bagian dari komunikasi publik dalam rangka memberikan pencerahan tentang industri sawit yang merupakan komoditas andalan Indonesia namun masih banyak disalah pahami. Dalam kesempatan itu setiap tamu mendapatkan buku “Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan”.

**Selengkapnya di halaman 6*

Urgensi Pengembangan Teknologi Sawit

Tanpa terobosan-terobosan teknologi yang signifikan, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global, terutama di tengah semakin ketatnya tuntutan pasar internasional terhadap produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Harus ada perencanaan bersama yang matang antara lembaga riset dengan industri sehingga invensi teknologi berkembang pesat dan hasilnya dapat langsung bisa dimanfaatkan. Sejauh mana capaian invensi sawit di Indonesia?

**Selengkapnya di halaman 8*

Nasib Ekspor Sawit Indonesia ke India

Ketergantungan India pada CPO Indonesia sangat tinggi. Antara 2020 hingga 2022, volume ekspor CPO ke India melampaui negara tujuan ekspor lainnya, sementara RBDPO menempati urutan kelima. Ketergantungan ini menunjukkan betapa vitalnya peran Indonesia dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati India, terutama untuk industri pengolahan domestiknya. Tetapi belakangan ini India secara berkala menyesuaikan tarif impor untuk melindungi industri minyak nabati domestik. Bagaimana nasib ekspor sawit Indonesia? **Selengkapnya di halaman 12*



Dr. Sofyan A. Djalil

Editorial

Persaingan dagang di dunia internasional merupakan sebuah keniscayaan. Masing-masing pihak berusaha mengamankan kepentingannya. Dalam situasi yang demikian, komoditas paling unggul biasanya akan menjadi “bulan-bulanan”. Itulah kira-kira yang tengah dihadapi produk kelapa sawit. Banyak hal yang perlu kita upayakan bersama agar sawit semakin kompetitif. Selamat membaca IPOSS News Edisi Ketujuh.

Detik-Detik Menjelang Penundaan EUDR

Isu penundaan pelaksanaan *European Union Deforestation Free Regulation* (EUDR) bergaung sangat nyaring di awal Oktober ini. *Lobby* tanpa henti dari berbagai pihak terhadap Uni Eropa diyakini akan membuahkan hasil. Namun bila tidak memelihara keadaan, bisa saja keadaan berubah dalam sekejap.

Keyakinan tentang penundaan EUDR itu lebih menguat setelah Komisi Eropa mengusulkan pemunduran pelaksanaan EUDR selama 12 bulan untuk perusahaan besar dan 18 bulan untuk perusahaan kecil dan mikro. Komisi Eropa kabarnya juga menunda “*benchmarking*” negara-negara beresiko sampai dengan Juni 2025 dimana mayoritas negara akan berpotensi punya ranking “*low risk*” terhadap deforestasi. Bahkan, konon Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, 2 Oktober 2024 lalu sudah mengonfirmasi rencana penundaan pelaksanaan EUDR dimaksud.

Kita percaya bahwa usaha keras tidak akan menkhianati hasil. Boleh dibilang, saat ini adalah waktu menunggu bagaimana palu penundaan itu akan diketok. Semua pihak yang memiliki *concern* tinggal mengawal keputusan itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan dengan konten yang juga sesuai kemauan kita. Jika benar nantinya sesuai harapan, maka dalam setahun kedepan, ekspor berbagai komoditi, utamanya sawit Indonesia ke Eropa akan berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pada saat diplomat Indonesia di Brussels bersama pihak-pihak terus melakukan pengawalan atas konsep keputusan penundaan itu, maka kondisi lingkungan yang menjadi perhatian EUDR sebaiknya dalam keadaan yang super kondusif. Tidak boleh ada riak-riak yang memicu isu yang terkait deforestasi. Sebab, banyak hal bisa saja mempengaruhi rencana penundaan tersebut, termasuk melakukan pembatalan penundaan.

Riak-riak yang tidak berguna itu bukan hanya tidak boleh dilakukan oleh Indonesia namun juga negara-negara lain yang memiliki *concern* yang sama, termasuk India, Malaysia, Amerika Serikat dan berbagai organisasi perdagangan lainnya. Semua pihak harus saling rangkul, jaga, menguatkan dan berada di rel yang benar.

Kita mesti paham, bagi Uni Eropa, menunda EUDR bukanlah masalah yang mudah karena menyangkut kredibilitas dan *dignity*. Negara-negara tua dan merasa memiliki peradaban tinggi itu, biasanya tidak mau dengan mudah digoyang keputusannya oleh negara-negara lain yang dianggap kecil karena tidak punya *bargaining power* yang memadai. Dalam teorinya, sekali mereka menentukan maka harus bisa melaksanakan.



Ilustrasi EUDR yang ditunda (dok. istimewa)

Nah, ketika Uni Eropa mau berkompromi untuk menunda EUDR, ini berarti bahwa mereka mau mundur selangkah, tetapi bukan berarti mereka akan dengan mudah bersedia menghapuskannya. Pemunduran ini hanya bermakna bahwa mereka dapat memahami *concern* kita yang berseberangan, namun bukan serta merta berarti mengakui ada sesuatu yang salah.

Jangan lupa juga bahwa penundaan ini pasti akan menciptakan cibiran yang luas dari kalangan yang pro EUDR seperti pencinta lingkungan, aktivis HAM dan lainnya. Mereka, seperti juga yang kontra EUDR, punya kekuatan daya desak dan *lobby* yang luar biasa. Berbagai media juga senantiasa dipakai untuk bekampanye dan menekan Uni Eropa. Dengan demikian sebenarnya Uni Eropa dalam keadaan yang relatif “maju kena mundur kena”. Usulan Komisi Eropa untuk penundaan tersebut bisa dimaknai bahwa mereka mengambil prioritas saja dan sekaligus siap dicemooh di lini yang lain.

Dalam keadaan yang demikian, kegiatan yang tidak kondusif seperti deforestasi atau kegiatan terkait lainnya, di masa-masa tunggu sekarang, bisa menguatkan kembali tekad Uni Eropa untuk melaksanakan EUDR secara penuh pada akhir tahun 2024 ini. Semua dapat mengalami perubahan dalam sekejap.

Kita semua harus saling menjaga marwah pihak lain. Harus senantiasa *alert* dan mawas diri. Jelas, tidak ada tempat dan waktu untuk selebrasi. (MAS)

Isu Sawit dalam Pembangunan Keberlanjutan



Acara diskusi bertajuk "Kelapa Sawit dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Sains, Ekonomi, dan Lingkungan", UGM, 26 September 2024. (dok. IPOSS)

Sawit yang berkelanjutan senantiasa menjadi topik yang hangat dan bahan diskusi yang tiada habisnya. Namun di Yogyakarta, IPOSS justru menggelar diskusi dengan tema yang lebih menantang, yakni kelapa sawit dalam pembangunan berkelanjutan. Diskusi di kota gudeg ini seolah ingin menegaskan bahwa sawit telah terbukti memberikan kontribusi bagi ekonomi Indonesia dan berpotensi menjadi kontributor pembangunan di masa mendatang.

Siang itu, Kamis 26 September 2024, kisaran 350 insan akademik, utamanya dari UGM, UNY dan UMY berbondong-bondong hadir memenuhi Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, Magister Manajemen, UGM. Ada yang datang dengan bus, mobil pribadi ataupun dengan roda dua, bahkan jalan kaki. Anak-anak muda itu siap untuk mendiskusikan "Kelapa sawit dalam Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Sains, Ekonomi dan Lingkungan".

Dari podium, Dubes Yuri O. Thamrin selaku Dewan Pengawas IPOSS mengingatkan, Indonesia pernah dikenal sebagai penghasil utama berbagai komoditas dunia seperti cengkeh, pala, karet, tebu, dan teh. Sayangnya, kejayaan komoditas-komoditas tersebut kini semakin memudar. Faktor-faktor seperti perubahan alam, gaya hidup, serta perkembangan teknologi turut berperan dalam penurunan ini.

Kini, Indonesia telah memiliki kembali kelapa sawit yang punya nilai ekonomi sangat strategis sehingga harus dijaga oleh semua pihak. Apalagi komoditas ini menghidupi kisaran 18 juta penduduk Indonesia dari rantai hulu hingga hilir, suatu jumlah yang melebihi penduduk Belanda. Tak heran, sawit telah menjadi barang yang sangat berharga dan akan dilindungi dari ancaman siapapun. *"Palm oil used to be low politic, just a trade dispute, but now become high politic for Indonesia,"* ujarnya.

Yuri seolah menghipnotis hadirin yang memenuhi ruangan. Kalimat-kalimatnya yang tertata dengan diksi yang disiapkan dengan baik membuat mereka melupakan bahwa di siang hari seperti itu adalah waktu paling tepat untuk sejenak memejamkan mata. Acara pun terus berlangsung dengan

menghadirkan para pembicara yang atraktif dan kompeten. Akhmad Akbar Susanto, PhD selaku pembicara menyatakan, terlepas dari berbagai potensi yang memang luar biasa, terdapat tantangan yang muncul dari pengusahaan sawit, baik yang mencakup aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang membuat sawit diterpa isu negatif. Pertama, tantangan yang murni dari pengusahaan sawit. Kedua, tantangan yang muncul karena perilaku negatif sebagian pihak (pengusaha yang nakal). Ketiga, tantangan-tantangan yang muncul karena lemahnya institusi hukum di Indonesia. Tantangan ini sebenarnya bersifat umum, terjadi juga pada hampir semua lapangan usaha di Indonesia, baik di sektor-sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan maupun jasa-jasa. Namun karena sawit ini sedang berada di atas panggung (primadona), maka otomatis menjadi bahasan publik di banyak forum.

Untuk itulah peran berbagai *stakeholder*, termasuk institusi pendidikan dan para akademisinya mutlak diperlukan demi keberlanjutan sawit yang merupakan satu-satunya komoditas perkebunan yang dapat diandalkan sebagai penopang perekonomian. Realita di lapangan terdapat perbedaan pandangan terkait industri ini, tanpa terkecuali antar perguruan tinggi, maka dialog terbuka butuh sekali dilaksanakan secara rutin untuk saling memahami atau menguatkan argumentasi.

Yang unik, ditengarai banyak juga warga Indonesia yang mengamini isu negatif yang dihembuskan pihak asing, alias gemar menari di atas gendang orang lain. Mereka lupa bahwa sawit adalah anugerah yang menghidupi lebih dari jutaan saudara mereka. Karenanya, isu kampanye negatif tentang sawit dan produk turunannya perlu direspon secara *scientific* dan proporsional, sehingga berkah sawit dapat bermanfaat bagi pengembangan peradaban bangsa Indonesia secara berkelanjutan.

Acara diskusi sawit ini dipungkasi dengan pengumuman 3 penanya terbaik yang masing-masing diganjar hadiah Rp 1 juta, yang disabet oleh dua mahasiswa UGM dan satu mahasiswa UMY. (MAS)

Dari Sandal hingga Rompi Anti Peluru



Ilustrasi rompi anti-peluru dari biomaterial kelapa sawit (dok. istimewa)

Peningkatan produk hilir kelapa sawit Indonesia relatif melesat. Sayangnya, produk hilir yang dikembangkan selama ini masih sebatas yang terkait dengan turunan minyak kelapa sawit (CPO). Sementara dari produk sampingnya (*by-product*), bisa dikatakan masih belum optimal. Padahal potensi yang ada begitu besar.

Produk samping tandan kosong kelapa sawit (TKKS) atau dalam istilah Bahasa Inggris *Oil Palm Empty Fruit Bunches* (OPEFB) merupakan 23% dari Tandan Buah Segar (TBS). TKKS memiliki potensi untuk industri biomaterial dengan kandungan *lignoselulosa* yang mencapai 55-60%. *Lignoselulosa* sendiri adalah komponen utama penyusun TKKS yang memiliki kemampuan menyerap logam yang berpotensi menjadi bahan utama ragam produk. Setiap tahunnya diperkirakan terdapat 15,5 juta ton TKKS yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Selama ini kita hanya memberikan makna kepada CPO dan produk turunannya saja. Sementara produk non-CPO yang kita sebut dengan limbah atau *by-product* belum mendapat perhatian yang optimal, padahal memiliki banyak kegunaan. Produk hilirisasi yang sering dikatakan sebanyak 160-an jenis itu belum mencakup *by product* sawit. Seperti tandan kosong hanya menjadi *waste* yang dikembalikan ke kebun sebagai pupuk. Padahal tandan kosong ini masih memiliki banyak *value* lain yang mesti kita riset dan kembangkan,” ungkap Kapusdi Sawit Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Budi Mulyanto di Bogor, Senin (30/10/2024).

Diantara produk dari biomaterial sawit yang sudah diciptakan IPB, seperti terungkap di seminar kelapa sawit: untuk industri biomaterial dan tekstil di Bogor (30/09/2024), antara lain berupa produk *fashion* seperti sandal, baju, tas, dompet dan pakaian. Peneliti sekaligus inovator Dr. Siti Nikmatin menjelaskan bahwa IPB ingin menciptakan *future fashion*, tidak hanya berbahan kapas dan benang sintetis, namun berbasis biomaterial sawit. Dr. Siti bersama tim sejak lama mengembangkan daur ulang TKKS menjadi benang yang

dapat dipergunakan sebagai aplikasi industri kreatif *fashion*. Dr. Siti juga mengungkapkan apa yang dilakukannya atas kerjasama banyak pihak tersebut merupakan pembuktian bahwa semua produk yang dihasilkan dari kelapa sawit, tanpa terkecuali benar-benar *sustainable*.

Pada seminar tersebut, Dr. Siti dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga tengah mengembangkan rompi anti peluru dari serat TKKS. Menurutnya, produk rompi anti peluru merupakan salah satu alat pertahanan negara yang saat ini bahan bakunya masih 100% impor. Padahal, Indonesia sendiri bisa membuatnya di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih dari 50% dan TKKS ini memiliki potensi besar untuk menggantikan bahan impor tersebut. Prototipe rompi anti peluru tersebut sejauh ini telah diuji tembak dengan pistol merk Glock dan peluru MU1-TJ.

Menurut peneliti utama Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD Kolonel. Cpl. Kries Kambaksono (30/10/2024), rompi anti peluru dari serat sawit memang memiliki sejumlah keunggulan. Namun demikian, produk masih perlu dikembangkan lagi untuk mencapai taraf standar ideal perlengkapan militer. Sebagai contoh, Kries menjelaskan perlu dipastikan sejauh mana daya tahan tembus rompi saat ditembak peluru kaliber 9 mm. Idealnya, rompi tidak akan tembus peluru dengan deformasi (perubahan bentuk fisik peluru saat mengenai target) maksimal 44 mm.

Sejauh ini produk hilir dari CPO dikelompokkan menjadi tiga kategori kelompok besar yaitu oleopangan, oleokimia dan *biofuel*. Kelompok turunan oleopangan dapat menghasilkan minyak goreng, margarin, hingga *shortening* (mentega putih), dan lainnya. Kelompok oleokimia menjadi produk antara lain sabun, shampo, deterjen, hingga biolubricant. Sementara dari kelompok *biofuel* CPO sudah dapat dihasilkan produk biodiesel, bioethanol, biogas. Kedepan, *by product* sawit semestinya dapat terus dikembangkan sebagaimana produk hilir dari CPO. (AM)

Keanekaragaman Hayati Enyah di Perkebunan Sawit?

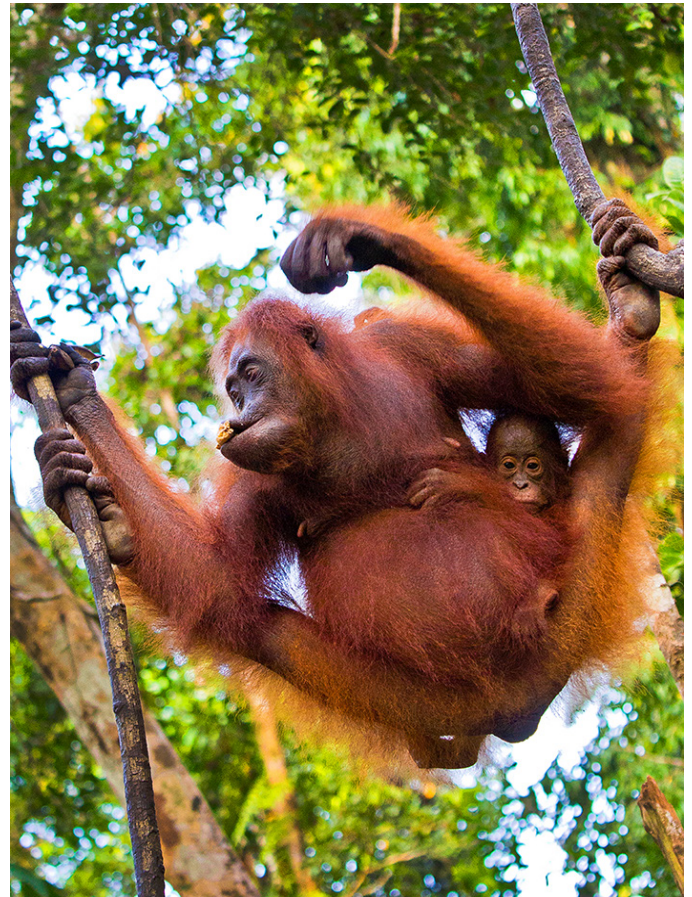
Pengembangan perkebunan kelapa sawit kerap dituding banyak pihak termasuk biang keladi enyahnya keragaman hayati (*biodiversity lost*). Bill Gates, Pemilik Microsoft, dalam situs blognya pernah mengatakan perkebunan kelapa sawit berdampak buruk bagi lingkungan hidup akibat deforestasi. Benarkah tudingan tersebut, atau hanya mitos semata sebagaimana yang sudah-sudah?

Menurut Prof. Yanto Santosa, Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), dalam program Inspirasi Pagi TV One News (8/10/2024), anggapan biodiversitas lenyap akibat berkembangnya perkebunan kelapa sawit adalah mitos. Memang, di sebagian kebun sawit yang lahannya berasal dari hutan sekunder terjadi penurunan spesies mamalia, tetapi spesies lainnya seperti burung dan reptil justru meningkat drastis.

Yanto tidak sendirian. Pendapatnya sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit *United Plantations* (UP) di Kalimantan Tengah bersama Tim Konservasi Copenhagen Zoo, Denmark tahun 2011-2019. Dikutip dari situs resmi UP, melalui proyek yang mereka lakukan dalam rangka merehabilitasi hutan koridor di area perkebunan sawit, didapati temuan bahwa burung adalah spesies yang meningkat paling signifikan. Dari yang tadinya hanya sekitar 13 spesies di tahun 2011 menjadi 183 spesies burung di tahun 2019 sebagai konsekuensi atas keberhasilan hutan koridor, sehingga keanekaragaman hayati dapat dipertahankan di sekitar sawit.

Dalam tayangan video trailer *Orangutan in the Land of Orangutan* pada Channel YouTube @cphdox4091 (Channel milik Copenhagen International Documentary Film Festival), Keragaman hayati spesies ular di perkebunan kelapa sawit membuat kagum Romulus Whitaker, ahli reptil kenamaan asal Amerika Serikat. Whitaker yang merupakan salah satu tim ahli Copenhagen Zoo dalam proyeknya dengan pihak UP mengungkapkan dirinya sangat terkesan dengan spirit keanekaragaman hayati di perkebunan kelapa sawit.

Lalu mengapa publik masih salah paham? Ya, karena mereka seringkali lupa mengetahui dan menyimak program-program konservasi spesifik seperti yang dilakukan perusahaan UP akibat banyaknya informasi yang mengalir di zaman digital ini (*paradox of plenty*). Tidak hanya UP, ternyata perusahaan sawit besar umumnya juga melakukan upaya-upaya serius dalam rangka melindungi *High Conservation Value* (HCV), kawasan dengan potensi karbon yang tinggi, hingga konservasi satwa langka.



Ilustrasi keanekaragaman hayati di kebun sawit (dok. envato)

“Perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen yang tinggi untuk konservasi dan mendampingi masyarakat sekitar untuk menjaga hutan mereka,” aku pakar lingkungan Instiper Yogyakarta, Siti Maimunah, dikutip siaran Inspirasi Pagi TV One News (8/10/2024).

Siti Maimunah yang telah berpengalaman memberikan pendampingan kepada perusahaan-perusahaan sawit di Kalimantan menceritakan bagaimana dukungan yang besar dari perusahaan-perusahaan sawit dalam upaya konservasi orangutan. Upaya yang dilakukan seperti penanaman pohon pakan primata mulai dari jambu-jambuan, nangka, hingga durian secara masif di kawasan hutan sekitar perkebunan. Program-program keberlanjutan yang dilakukan tersebut menurut Siti Maimunah berhasil mendorong peningkatan keragaman hayati yang terpantau dari peningkatan jumlah satwa seperti rusa, ular, kura-kura, tupai, macam-macam jenis burung seperti rangkok, merak Kalimantan, dan termasuk orangutan. Selain jumlahnya yang meningkat, spesies satwa yang ada juga turut meningkat.

Terlepas dari capaian yang dihasilkan, fakta ini membuktikan industri kelapa sawit menaruh perhatian besar terhadap isu lingkungan. Bertolakbelakang dengan tuduhan bahwa industri kelapa sawit memberangus alam serta keanekaragaman hayatinya. Lebih dari pada itu, hajat hidup lebih dari 16 juta manusia Indonesia yang ditopang industri kelapa sawit tidak kalah pentingnya dari keanekaragaman satwa yang seringkali lebih diabaikan oleh para pihak anti sawit. (AM)

Ketika Gates Ingin Bisnis “Sawit”

Makin lama, sawit terbukti semakin tampak seksi dan bikin iri. Banyak pihak yang ingin menyaingi sawit terus bekerja keras meraup legitimasi. Setelah Uni Eropa dengan EUDR-nya jelas-jelas mencoba menjegal produk sawit di wilayahnya, Bill Gates kini tengah mengembangkan proyek minyak sawit artifisial dengan menggelontorkan dana segar 3,5 juta dolar. Naga-naganya, usaha ini belum menemukan hasil yang memuaskan.

Bill Gates tanpa banyak kalam memuji penemuan minyak sintesis guna menggantikan atau menyaingi minyak sawit yang asli. Dalam situs blognya [gatesnotes.com](https://www.gatesnotes.com) (13/02/24) Gates berdalih, minyak sawit yang dibutuhkan dunia saat ini telah berkontribusi pada kerusakan alam dan ekosistem. Ia bahkan tidak ragu-ragu menyebut deforestasi di Indonesia dan Malaysia terjadi demi memuluskan program penanaman sawit.

Sehubungan dengan hal itu, Gates menyebut sudah adanya perusahaan-perusahaan yang mencoba mencari jalan keluar, dimana dirinya menjadi salah satu investornya. Diantaranya bernama C16 Biosciences yang berupaya membuat alternatif minyak sawit. Sejak 2017, C16 mengembangkan produk dari mikroba ragi liar menggunakan proses fermentasi yang diklaim tidak menghasilkan emisi sama sekali. Meski secara kimiawi berbeda dari minyak sawit konvensional, namun minyak C16 mengandung asam lemak yang sama, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi serupa.

Pernyataan Gates bahwa sawit sebagai biang keladi deforestasi tersebut telah memantik rasa marah, tidak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, sebab tidak sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Indonesia sendiri telah mematok moratorium penambahan lahan sawit sejak tahun 2018 dan belum pernah mencabutnya hingga saat ini. Catatan-catatan yang ada juga menunjukkan bahwa dari saat itu hingga kini, deforestasi akibat sawit bisa ditekan dengan sangat baik. Tidak heran bila kemudian, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) pada bulan Mei mengirimkan pesan keras kepada Gates dengan nada kesal yang menyebut Gates lebih bersahabat dengan alam dibanding kehidupan jutaan manusia yang bekerja sebagai pekebun.

Uniknya, di satu sisi Gates menuduh sawit sebagai biang kerok deforestasi, namun di sisi lain juga mengakui bahwa minyak sawit memiliki keunggulan yang luar biasa dan nyaris tidak ada yang menandingi dalam memenuhi kebutuhan manusia. Menurutnya, minyak sawit juga satu-satunya minyak nabati dengan keseimbangan lemak jenuh dan tak jenuh yang hampir sama, itulah sebabnya minyak ini sangat serbaguna. Jika lemak hewan adalah bahan utama dalam beberapa makanan, maka minyak sawit adalah pemain tim yang dapat bekerja untuk membuat hampir semua makanan dan barang-barang non-makanan menjadi lebih enak.



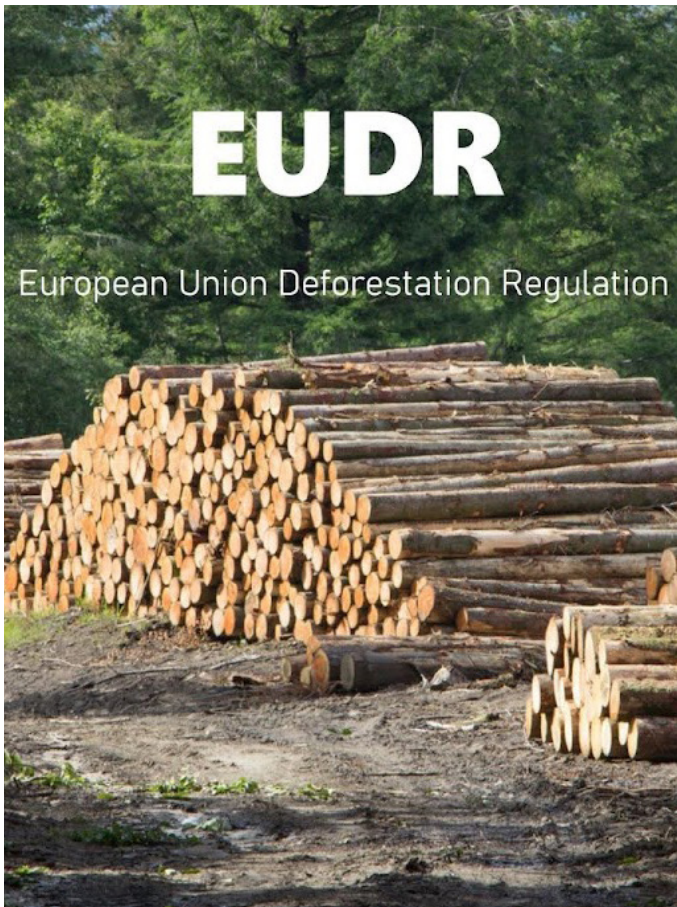
Ilustrasi Bill Gates dan C16. (dok. istimewa)

Dari pernyataannya itu, orang pun kemudian banyak yang mulai menduga-duga bahwa niatan Gates kemungkinan bukan menyelamatkan alam, namun lebih untuk meraup cuan dari bisnis minyak sawit buatan. Kecurigaan itu menjadi semakin tebal setelah di halaman depan situs C16 Biosciences muncul *pop up* gambar besar dengan judul : *We are here to help EUDR Resources*.

Bisa dibayangkan, bila penelitiannya melalui C16 itu berhasil dan mampu menghasilkan minyak sawit buatan yang mirip dengan aslinya plus dengan harga yang kompetitif, dipastikan Gates akan punya pengaruh besar dalam pasar sawit dunia, atau bahkan mampu mengambil alih bisnis sawit yang kini menghidupi jutaan petani di seluruh garis khatulistiwa dunia. Gates yang saat ini menduduki ranking 13 orang kaya di dunia (Forbes), bisa-bisa melompat ke 10 besar negara minyak sawit *artificial*.

Terakhir, jika saja Gates berkilah bahwa deforestasi di Indonesia dan Malaysia pada tahun 2018 telah menyumbang 1,4% dari emisi global, atau lebih besar dari emisi negara bagian California, mengapa ia tidak pernah mempermasalahkan deforestasi Amerika Serikat yang berlangsung selama seratusan tahun atau deforestasi Eropa untuk padang penggembalaan ternak dan ladang pertanian lainnya. *Wallahu a'lam bisawab* (MAS)

Bersikap Positif Terhadap Pengunduran EUDR



Ilustrasi EUDR (dok. TentangKayu.com)

Saat ini, banyak negara sedang menunggu keputusan resmi Uni Eropa untuk mengundurkan pelaksanaan EUDR selama setahun ke belakang. Dipercaya bahwa langkah ini akan memberikan ruang dan waktu untuk berbenah sehingga nantinya petani sawit tidak terlalu terdampak. Namun unikny, kabar gembira itu dinilai oleh sebagian kalangan sebagai langkah mundur dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

Menurut laman Betahita.id dan info.SAWIT (8/10/24), sebanyak 45 LSM yang menamakan dirinya Koalisi CSO (organisasi masyarakat sipil) untuk EUDR berkilah bahwa penundaan EUDR justru akan berpengaruh negatif atas upaya mendorong perbaikan tata kelola di sektor komoditas di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki kepentingan untuk melindungi lima komoditas yang diatur dalam EUDR, yakni kayu, sawit, kakao, kopi dan karet.

Menurut penilaian kelompok LSM yang terdiri antara lain dari serikat tani dan buruh perkebunan, masyarakat adat dan perempuan itu, penundaan ini merupakan hal buruk karena dianggap membuka peluang untuk kehilangan tutupan hutan atau terjadinya deforestasi. Di sisi lain, anti deforestasi, ketertelusuran dan legalitas yang menjadi prasyarat yang ada pada EUDR dianggap positif untuk

memaksa percepatan-percepatan tata kelola komoditas di negara produsen seperti Indonesia.

“Maka, jika ditunda, tidak ada lagi faktor eksternal yang mendorong atau memaksa bisnis di Indonesia memperbaiki dirinya. Kami sangat menyayangkan hal tersebut,” kata Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, dalam diskusi media di Jakarta, Senin (7/10/2024) yang kemudian dikutip Betahita.

Menurut Andi, implementasi EUDR sesuai rencana awal dapat mencegah deforestasi seluas 17,1 juta hektare hutan alam yang telah dibebani izin di Indonesia. Di antaranya, terdapat 2,6 juta hektare komoditas sawit. “Bayangkan, apa yang dapat terjadi dalam 12 bulan masa penundaan tersebut? Berapa banyak hutan Indonesia yang akan hilang?” katanya.

Suara nyaring LSM tersebut tentu berseberangan dengan tekad yang dimiliki oleh Pemerintah untuk melindungi para petaninya yang terancam tidak bisa melakukan ekspor komoditasnya ke Uni Eropa. Jeda waktu setahun pelaksanaan justru dimaknai oleh Pemerintah dan beberapa kalangan lainnya sebagai waktu tambahan untuk berbenah dan mempersiapkan diri. Sebab, ternyata yang tidak siap dengan peraturan EUDR yang begitu rumit bukan hanya para petani sawit Indonesia, Malaysia dan negara-negara produsen sawit lainnya di garis katulistiwa, namun juga mereka yang akan mengimplementasikannya di Uni Eropa.

Pengunduran waktu pelaksanaan selama 12 bulan sudah semestinya dimaknai positif bagi semua kalangan sebagai waktu yang cukup untuk memperbaiki aspek legalitas tanah, membereskan tumpang tindih hak atas tanah, ketertelusuran dan menegaskan bahwa moratorium deforestasi untuk kepentingan sawit tetap dipatuhi. Waktu setahun kedepan, juga menjadi waktu yang krusial untuk benah-benah aturan serta semrawutnya kewenangan.

Bisa jadi, kelompok LSM tersebut berpendapat hanya melalui sebuah pemaksaan keadaan maka banyak hal, termasuk pelestarian lingkungan bisa dilaksanakan. Atau mungkin mereka pernah mengalami suatu keadaan buruk yang susah diubah yang membuat mereka frustrasi sehingga lebih suka melakukan pendekatan *reward and punishment*.

Tentu saja sebagai negara demokrasi yang menghargai perbedaan pendapat, pihak yang tidak setuju dengan kelompok LSM tersebut harus lega menerima berbagai kritik yang mereka lontarkan. Kritik tersebut bisa menjadi obat bahwa hal-hal yang menjadi keprihatinan mereka benar-benar tidak akan terjadi selama setahun kedepan, serta kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk pembenahan secara maksimal.

Semua pihak kini sudah harus sadar, ada atau tidak adanya EUDR, tuntutan pasar global mesti dipenuhi. (MAS)

Rencana B40 & B50, Mungkinkah *Feedstock* CPO Mencukupi?

Rencana penerapan B40 dan B50 di Indonesia merupakan bagian dari upaya besar transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan biodiesel yang berbahan dasar minyak kelapa sawit. Menurut BDPKS, untuk memenuhi target B40, dibutuhkan CPO sebesar 14 juta ton per tahun, dan apabila dimandatkan B50, akan membutuhkan 17,5 juta ton CPO per tahun.

Penetapan mandat ini tentu membutuhkan peningkatan pasokan CPO sebagai *feedstock* biodiesel. Namun, produksi CPO dalam negeri dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan, berkisar antara 48-50 juta ton per tahun. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana *feedstock* CPO dalam negeri dalam menyambut mandat Biodiesel pada tahun depan?

Sejumlah pihak mulai meragukan dan khawatir mengenai kecukupan produksi CPO domestik dalam memenuhi kebutuhan peningkatan mandat biodiesel. Jika produksi tidak mengalami peningkatan, pasokan CPO untuk ekspor maupun kebutuhan pangan dan industri lainnya dapat berkurang. Kondisi ini juga diduga akan berpotensi menaikkan harga CPO.

Berdasarkan data GAPKI, produksi CPO s.d Juli 2024 mengalami penurunan 5,9% dibandingkan tahun 2023 untuk periode yang sama. Dari analisa IPOSS, salah satu penyebab penurunan produksi adalah El Niño yang terjadi sejak Juli 2023 hingga April 2024. Menurut BMKG, El Niño merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah dan timur yang lebih panas dari normalnya. Dampaknya, terjadi cuaca ekstrem yang menyebabkan curah hujan berkurang di beberapa wilayah Indonesia sehingga menimbulkan kekeringan berupa defisit air termasuk di kebun kelapa sawit.

Menurut PPKS, kekeringan yang terjadi pada tanaman kelapa sawit dapat berpengaruh pada penurunan Berat

Rata-rata Tandan (BRT) kelapa sawit dalam 1-6 bulan setelah fenomena ini. Dampak El Niño sejak pertengahan 2023 telah menyebabkan penurunan produksi dari Januari hingga September 2024. Meskipun produksi diperkirakan akan pulih pada Oktober hingga Desember, total produksi CPO diprediksi mencapai 49,2 juta ton hingga akhir tahun 2024, meskipun angka ini masih sedikit lebih rendah, turun 1,6% dibandingkan dengan produksi tahun 2023.

Potensi produksi tahun 2025 diharapkan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan produksi CPO meliputi perluasan luas Tanaman Menghasilkan (TM), sebagian dari kebun rakyat dan swasta, serta hasil peremajaan tahun 2020-2021. Diharapkan terjadi peningkatan produktivitas sawit dari hasil peremajaan tersebut.

Selain itu, dengan tidak adanya gangguan iklim seperti El Niño pada akhir 2024, capaian produksi pada tahun 2025 dapat meningkat sebesar 3%, dengan proyeksi produksi mencapai 51 juta ton CPO.

Walaupun terjadi kenaikan produksi, jumlahnya belum cukup signifikan. Peningkatan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan CPO yang meningkat untuk mandat biodiesel, baik B40 maupun B50, yang diperkirakan memerlukan tambahan CPO sebesar 1,8 juta ton untuk B40 dan 5,3 juta ton untuk B50. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan pasokan CPO untuk memenuhi mandat biodiesel.

Namun, pengurangan alokasi untuk pangan atau oleokimia tidak mungkin dilakukan, mengingat dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, satu-satunya alokasi yang akan dikorbankan adalah alokasi ekspor.

Berdasarkan analisa dan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rencana peningkatan mandat biodiesel berpotensi terhambat karena adanya keterbatasan produksi CPO dalam negeri. (MA)



Ilustrasi biodiesel B40-B100 (dok. Bloomberg/DimasArdian)

Dasbor Nasional: Sanggupkah Penuhi Standar EUDR?



Dasbor Siperibun (dok. Siperibun)

Pemerintah Indonesia telah menyiapkan Dasbor Nasional Komoditi atau *National Dashboard for Commodities* (NDC) sebagai langkah strategis untuk memenuhi *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Dasbor yang dikelola Surveyor Indonesia ini akan menjadi pusat pengintegrasian berbagai workstreams terkait komoditas terdampak EUDR, termasuk kelapa sawit. Namun, mengingat tingginya standar yang diterapkan oleh Uni Eropa, timbul pertanyaan: mampukah dasbor ini memenuhi standar tersebut?

Pelaksanaan EUDR yang semula direncanakan berlaku mulai akhir 2024 berpotensi ditunda selama satu tahun. Penerapan EUDR akan berfokus pada lima *workstreams* yaitu: inklusivitas petani kecil dalam rantai pasok, skema sertifikasi yang relevan, ketertelusuran (*traceability*), data ilmiah terkait deforestasi dan degradasi hutan, serta perlindungan data pribadi. Di antara aspek-aspek tersebut, ketertelusuran masih menjadi tantangan terbesar bagi Indonesia saat ini.

Menurut pernyataan Dirjenbun, NDC berfungsi sebagai alat ketertelusuran komoditas yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun) untuk perusahaan dan sistem Surat Tanda Daftar Budidaya (e-STDB) untuk pekebun. NDC akan melakukan piloting system dengan mengintegrasikan data dan informasi dari Siperibun dan e-STDB yang pada akhirnya akan menghasilkan kode identik/*barcode* yang memuat informasi ketertelusuran. Namun, data dari Satgas Sawit tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 621 perusahaan sawit yang terdaftar di Siperibun dari lebih dari 1.500 perusahaan sawit di Indonesia. Sementara itu, untuk pekebun rakyat, hanya sekitar 411 ribu hektare dari total 6,2 juta hektar yang sudah memiliki e-STDB, atau kurang dari 7%.

Pada 7 Oktober 2024, PT Wilmar Nabati Indonesia menjadi perusahaan pertama yang berhasil melakukan pengiriman

ekspor yang difasilitasi rangkaian piloting NDC. Wilmar berkomunikasi dengan pemerintah untuk memperoleh *National Dashboard Notes*, sebuah dokumen tambahan yang menjadi syarat ekspor ke Uni Eropa. Keberhasilan ini menunjukkan langkah awal yang positif dalam penerapan NDC. Namun, ada tantangan dalam memperluas partisipasi seluruh perusahaan dan petani swadaya dalam sistem ini.

Penundaan EUDR selama satu tahun harus dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi sistem ketertelusuran yang lebih inklusif, dengan memperkuat integrasi antara NDC, Siperibun, dan e-STDB. Siperibun harus menjadi platform wajib bagi seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan fasilitas yang bisa didapatkan perusahaan jika terdaftar pada Siperibun serta memberikan sanksi administratif yang tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban ini. Selain itu, pemerintah perlu memperluas sosialisasi e-STDB dan memberikan pendampingan bagi pekebun kecil, sekaligus menyederhanakan proses administrasi untuk mendorong partisipasi yang lebih luas.

Di luar hal-hal yang sudah disebutkan di atas, harmonisasi kriteria alih fungsi hutan antara versi Uni Eropa dan Indonesia juga perlu menjadi prioritas. Saat ini, Uni Eropa menganggap alih fungsi hutan, dalam berbagai bentuk, sebagai deforestasi. Namun, di Indonesia, terdapat aturan izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan hutan secara legal dengan persyaratan tertentu.

Waktu penundaan EUDR ini memang sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkuat operasional NDC. Dengan sistem yang lebih inklusif dan terintegrasi, Indonesia berpeluang besar mempertahankan posisinya dalam ekspor sawit berkelanjutan, sekaligus memenuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh Uni Eropa. (RFY)

India Naikkan Tarif Impor CPO: Apa Artinya bagi Ekspor Indonesia?



Ilustrasi ekspor Indonesia ke India (dok. istimewa)

Ketergantungan India pada CPO Indonesia sangat tinggi; antara 2020 hingga 2022, volume ekspor CPO ke India melampaui negara tujuan ekspor lainnya, sementara RBDPO menempati urutan kelima. Ketergantungan ini menunjukkan betapa vitalnya peran Indonesia dalam memenuhi kebutuhan minyak nabati India, terutama untuk industri pengolahan domestiknya.

Namun, kebijakan perdagangan India terhadap minyak nabati dikenal sangat responsif. Secara berkala, Pemerintah menyesuaikan tarif impor untuk melindungi industri minyak nabati domestik. Berbagai alat kebijakan fiskal seperti *basic import tax*, *basic customs duty*, *agricultural cess*, dan *social welfare cess*, dikerahkan untuk mendorong minyak nabati untuk diproduksi sendiri.

Komponen tarif dasar impor (*basic import tax*) menjadi kebijakan yang kerap berfluktuasi besarnya. Dengan adanya fluktuasi tarif yang responsif, bagaimana pengaruh perubahan tarif impor terhadap *volume* ekspor CPO Indonesia ke India?

IPOSS menganalisis hubungan antara kebijakan tarif impor dan volume ekspor Indonesia ke India, dengan hasil menunjukkan bahwa kenaikan tarif impor berdampak negatif pada volume ekspor. Metode *Vector Error Correction Model* (VECM) digunakan untuk membantu memahami hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara tarif impor dan volume ekspor CPO dan RBDPO dari Indonesia ke India.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif impor hanya memberikan dampak dalam jangka pendek. Misalnya, jika terjadi kenaikan tarif impor sebesar 1 USD dibandingkan

bulan lalu, volume ekspor CPO bisa turun hingga 1,4%, sementara RBDPO turun hingga 8,1%. Adanya instrumen fiskal lain selain tarif impor (*basic import tax*) dalam perdagangan diperkirakan menambah besaran dampak penurunan ekspor.

Analisis lebih lanjut dengan menggunakan *Impulse Response Function* (IRF) menunjukkan bahwa RBDPO lebih sensitif terhadap perubahan tarif dibandingkan CPO. Artinya, ketika tarif impor berubah, maka volume impor RBDPO lebih lama berfluktuasi dibandingkan CPO. Hal ini disebabkan oleh preferensi industri yang menganggap impor bahan mentah lebih ekonomis daripada produk olahan. Kebijakan tarif impor diferensial yang diterapkan pemerintah India untuk minyak mentah dan olahan mendorong pengolahan bahan baku di dalam negeri di India.

Meskipun perubahan kebijakan tarif impor tidak menunjukkan penurunan ekspor yang besar, penting untuk menjaga dan memperkuat hubungan diplomasi perdagangan dengan India. sangat penting, mengingat India adalah salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia. Negosiasi tarif bilateral yang lebih intensif dan penerapan kebijakan perdagangan yang inklusif, terutama dalam pemanfaatan kerangka ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA), akan menjadi langkah penting ke depan.

Memahami kebijakan dan dinamika perdagangan sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri minyak sawit. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam pasar minyak sawit global. (Op)

Menyoal Minimnya Pemanfaatan Inovasi Sawit

Sering diberitakan bahwa produktivitas kelapa sawit Malaysia lebih tinggi dari Indonesia. Produk hilirisasi yang dihasilkan negeri jiran pun konon juga lebih banyak. Padahal lahan yang mereka miliki jauh lebih sempit dari Indonesia. Salah satu faktor yang disinyalir menjadi penyebabnya adalah karena riset dan inovasi Malaysia lebih mudah kredibel sehingga tetap dapat memaksimalkan lahannya yang terbatas.

Harus diakui, produktivitas sawit Malaysia dapat mencapai rata-rata 4 – 6 ton per hektar/tahun, sementara di Indonesia hanya 3,5 – 3,6 ton. CNBC Indonesia melaporkan (1/2/2024), Sahat Sinaga selaku Plt. Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), pernah mengungkapkan pada 2023 bahwa produk hilir sawit yang telah dihasilkan Malaysia sebanyak 260 jenis. Sedangkan Indonesia baru di angka sekitar 179 jenis.

Menurut Tira Ardianti, *Head of Corporate Investor Relations* PT Astra International TBK, dikutip dari metrotvnews (19/09/2024), produktivitas sawit di Malaysia yang jauh lebih tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dan efisien berdampak signifikan dalam meningkatkan hasil panen. Selain itu, Malaysia juga telah lama melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan industri sawitnya, mulai dari pengembangan benih unggul hingga teknologi pertanian yang lebih modern.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam program Grant Riset Sawit (GRS) sebenarnya telah mengupayakan pengembangan riset dan teknologi pada industri sawit secara maksimal. Bahkan BPDPKS telah delapan kali telah menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia (Perisai) yang tahun ini berlangsung di Nusa Dua Bali 3 Oktober 2024 lalu. Kegiatan Perisai merupakan forum tahunan untuk mempertemukan para periset atau inventor teknologi sawit dengan pelaku industri sebagai calon investornya.

Tidak main-main, inovasi yang dihasilkan BPDPKS melalui GRS dari 2015-2023 tercatat mencapai 275 inovasi. Hanya sayangnya jumlah inovasi yang sampai pada level dilirik calon investor tidak lebih dari 26 inovasi teknologi. Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi mengapa pengembangan

teknologi baru sawit Indonesia tidak sampai pada tahap pengaplikasian. Hasil riset-riset mereka hanya sekadar catatan teori saja. Tersimpan di almari.

Prof. Ir. Didiek Hadjar Goenadi, Ketua Umum Asosiasi Inventor Indonesia menjelaskan, kendala riset dan pengembangan teknologi sawit di Indonesia antara lain adalah rendahnya kesesuaian teknologi dan kebutuhan

pasar. Contohnya adalah inovasi teknologi produksi emulsifier dari sawit (zat yang berfungsi menyatukan komponen air dan lemak) yang menghasilkan formula pasta. Sedangkan emulsifier yang dibutuhkan industri justru dalam bentuk formula *powder*.

Kendala lainnya yang diungkap oleh Didiek pada pembukaan kegiatan Perisai 2024, adalah rendahnya komitmen dari para periset itu sendiri. Umumnya tim periset program GRS akan bubar setelah kegiatan riset rampung, sehingga terjadi kelambanan respon saat terdapat permintaan khusus dari pihak industri. BHKn, banyak dari para periset yang juga kurang peduli terhadap keperluan untuk komersialisasi hasil risetnya. Hal ini menjadikan proses

pengembangan teknologi sawit banyak berhenti hanya pada tahap riset saja.

Mismatching dalam inovasi teknologi industri sawit di Indonesia mencerminkan masih adanya ego sektoral antar *stakeholder* terkait. Padahal sinergi dalam pengembangan teknologi sawit merupakan kunci keberlangsungan industri ini. Tanpa terobosan-terobosan teknologi yang signifikan, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global, terutama di tengah semakin ketatnya tuntutan pasar internasional terhadap produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Harus ada perencanaan bersama yang matang antara lembaga riset (periset) dengan industri sehingga inovasi yang dihasilkan langsung bisa dimanfaatkan.

Dengan komitmen yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong transformasi industri kelapa sawit yang lebih modern, produktif, dan berkelanjutan. Inovasi teknologi tidak hanya akan meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di pasar minyak nabati global. (AM)



Ilustrasi peneliti memeriksa hasil produksi CPO (dok. envato)

Top! Hilirisasi Sawit Indonesia Capai 200 Produk



Ilustrasi produk turunan kelapa sawit (dok. envato)

Komoditas kelapa sawit memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Tidak semua serta merta masuk kas negara, namun sebagian ada yang dipakai untuk pengembangan produk hilir sawit. Produk hilir sawit Indonesia kini sudah mulai melonjak jumlahnya, mengejar ketertinggalan dari negeri jiran.

Menurut data Kemenkeu, kontribusi industri sawit terhadap APBN 2023 tidak kurang dari Rp 88 triliun yang terdiri dari sektor pajak 50,2 triliun, PNPB Rp 32,4 triliun, dan bea keluar sebesar Rp 6,1 triliun. Pungutan bea keluar tersebut kemudian dipergunakan untuk mendorong peningkatan hilirisasi produk kelapa sawit. Pemerintah bersama kalangan swasta sepenuhnya sadar bahwa untuk keberlanjutan sawit diperlukan inovasi-inovasi pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau siap pakai.

Pemerintah Indonesia mulai intensif mendorong perkembangan hilirisasi kelapa sawit setelah tahun 2010. Acuan pengembangan industri hilir kelapa sawit ini diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13/M-IND/PER/1/2020 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit yang menjadi prakarsa penentuan prioritas pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Kebijakan tarif bea keluar dinilai menjadi salah satu model pendorong utama upaya hilirisasi industri kelapa sawit. Kebijakan tersebut membedakan tarif dari setiap produk sawit. Semakin hilir produk sawit yang diekspor, semakin rendah pula pungutan ekspor yang dikenakan. Tarif pungutan untuk CPO lebih tinggi dari produk *Refined Palm Oil*. Begitu pun pungutan produk *Refined Palm Oil* juga lebih tinggi dibandingkan dengan produk akhir berbasis sawit seperti biodiesel.

Empat belas tahun lalu (2010), komposisi ekspor produk sawit Indonesia (data BPS) masih didominasi bahan mentah atau *Crude Palm Oil* dengan pangsa sebesar 57 persen,

kemudian diikuti oleh kelompok produk *Processed Palm Oil* sebesar 38 persen dan produk akhir berbasis sawit atau *Palm Oil-based Products* sebesar 5 persen. Sementara jumlah produk hilir yang ada saat itu masih pada kisaran 45 jenis.

Sepuluh tahun kemudian (2020) tercatat di BPS, ekspor produk sawit Indonesia sudah didominasi oleh kelompok *Processed Palm Oil* dengan pangsa sebesar 67 persen, kemudian diikuti oleh kelompok *Palm Oil-based Products* sebesar 11 persen. Sementara itu, pangsa ekspor produk bahan mentah hanya sebesar 22 persen.

Tidak berhenti disitu. Produk hilir sawit terus digenjut untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus menghemat devisa. Pengeluaran impor Indonesia ditekan signifikan karena tersedianya produk hilir sawit. Salah satu konsekuensinya, penyaluran biodiesel yang ditingkatkan dari 0,92 juta kiloliter pada 2015 menjadi 2,24 juta kiloliter pada 2023 berdampak positif pada penghematan devisa impor solar mencapai Rp 121,5 triliun.

Bagaimana di tahun 2024? Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, sebagaimana dikutip Kantor Berita Antara (4/10/2024) menyatakan bahwa produk hasil hilirisasi sawit saat ini sudah mencapai 200 jenis, naik hampir lima kali lipat dalam kurun 10 tahun terakhir yang tercatat hanya terdapat 45 jenis. "Kelapa sawit menjadi model dan contoh sukses dari hilirisasi industri, baik itu untuk menghasilkan produk turunan sawit pangan (*oleofood*), non-pangan (*oleochemical*), bahan bakar terbarukan (*biofuel*), hingga material baru ramah lingkungan (*biomaterial*), pada skala industri berkelanjutan," ungkap Putu.

Saat ini produk hilir kelapa sawit bukan hanya berbasis pada turunan CPO, melainkan juga dari produk sampingnya seperti dari serat tandan kosong yang bisa dipakai sebagai bahan untuk industri *biomaterial* dan tekstil. Produk samping lainnya dari sawit yang telah dikembangkan berupa gliserol sawit yaitu senyawa organik yang dihasilkan dari produksi biodiesel sawit sebagai salah satu bahan utama pembuatan marka jalan. Tapi jangan terlalu cepat bertepuk tangan, sebab konon masih tersisa 30 persen potensi sawit yang belum tergarap yang menjadi tantangan dalam hilirisasi di masa-masa datang. (AM)



Pembina: **Sofyan Djalil**, Pemimpin Umum: **Nanang Hendarsah**,
Pemred: **M. Aji Surya**, Redaktur: **Dimas HP, Ahmad Mina**,
Staf Redaksi: **Dwivayani, Oktadianti, Raisya, Aura, Sylvia**
Desain: **Denis, Ridwan**

Sahid Sudirman Center, Lt 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220
email: info@iposs.co.id